



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT**

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN**

---

Tahun Sidang	: 2019-2020
Masa Persidangan	: I
Rapat ke	: 27
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat (RDP)
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: <b>Selasa, 10 Desember 2019</b>
Waktu	: 13.00 Wib
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai I Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270
Acara	: Membahas Pelaksanaan Program Tahun 2019 dan Kegiatan Anggaran Tahun 2020
Ketua Rapat	: <b>H. Marwan Dasopang</b>
Sekretaris Rapat	: Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos.,M.Si
Hadir	: 1. 16 dari 26 Anggota Panja BPIH Komisi VIII DPR RI; 2. 3 orang Anggota Komisi VIII DPR RI Izin; 3. Dirjen PHU Kemenag beserta jajaran

**I. PENDAHULUAN**

1. Ketua Rapat Panja membuka Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah pada pukul 13.50 Wib dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat dipimpin oleh Ketua Panja BPIH Komisi VIII DPR RI H. Marwan Dasopang, didampingi Wakil Ketua Dr.H.TB Ace Hasan Syadzily, M.Si, Laksdya TNI (Purn) Moekhlas Sidik, MPA, sesuai waktu dan tempat acara tersebut diatas

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

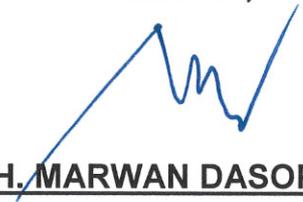
Pada Rapat Dengar Pendapat Panitia Kerja Komisi VIII DPR RI mengenai Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji bersama Panja BPIH Kementerian Agama RI dengan agenda "**Pembahasan Komponen BPIH Tahun 1441 H/2020 M,**" disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Panja Komisi VIII DPR RI mengenai BPIH Tahun 1441 H/2020 M telah memperoleh penjelasan dari Ketua Panja BPIH Kementerian Agama RI mengenai rincian komponen Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H/2020 M.
2. Panja Komisi VIII DPR RI mengenai BPIH Tahun 1441 H/2020 M mendesak Ketua Panja BPIH Kementerian Agama RI agar melakukan:
  - a. Meningkatkan negosiasi dan diplomasi dengan Pemerintah Arab Saudi terkait dengan penambahan kuota jemaah haji sebelum penetapan BPIH, pengecualian pengenaan biaya visa yang baru dikenakan pada tahun 2020, kebijakan *fast track*, dan penambahan jumlah zamzam bagi jemaah menjadi 10 liter.
  - b. Koordinasi dengan BPKH mengenai rencana penggunaan nilai manfaat keuangan haji Tahun 1441 H/2020 M.
  - c. Negosiasi dengan maskapai penerbangan, perusahaan penyedia avtur, *ground handling*, kebandaraan, *air navigation*, dan pihak terkait lainnya untuk menurunkan biaya penerbangan agar lebih efisien dari embarkasi ke Arab Saudi (PP) dan menyampaikan hasilnya pada rapat panja berikutnya.
  - d. Menambah jemaah cadangan sebesar 10% dari kuota haji reguler untuk mengisi sisa kuota.
3. Panja Komisi VIII DPR meminta Panja BPIH Pemerintah untuk meningkatkan semua jenis pelayanan dalam penyelenggaraan ibadah haji Tahun 1441H/2020M.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup pada Pukul 16.10 WIB.

**PIMPINAN PANJA KOMISI VIII DPR RI  
MENGENAI BPIH TAHUN 1441 H/2020 M  
KETUA,**



**H. MARWAN DASOPANG**